



**SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR SMP/SMA DI DESA GUNUNG SARI
PONDOK PESANTREN FATIMAH AZ ZAHRAH KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN**

Oleh

Iskandar¹, Wempi Feber², Jimmy Nasroen³, Masruri⁴, Syaini⁵, Budi Mulyadi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Kaltara

E-mail: ¹padosunikalsospol@gmail.com

Article History:

Received: 27-12-2023

Revised: 14-01-2024

Accepted: 28-01-2024

Keywords:

Sosialisasi, Pendidikan,
Politik

Abstract: Sosialisasi Pendidikan Politik calon Pemilih Pemula bagi kalangan pelajar SMP/SMA, khususnya yang akan atau sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek/paham demokrasi. Melalui sosialisasi, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga kalangan pelajar atau pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik karena mereka adalah calon-calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024 mendatang atau yang akan datang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi pemilih pemula yang dimiliki Desa Gunung Sari dalam keikutsertaannya pada pemilu akan datang maupun kedepannya. Dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dan interaktif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Kepada pemilih pemula SMP dan SMA Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dalam kegiatan tersebut disampaikan tentang kondisi saat ini menjelang pemilu.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris (*political socialization*) adalah pemberian pendidikan untuk mencapai aktualisasi diri dari individu dalam kedudukannya sebagai warga negara. Dua konsep utama dalam pendidikan politik adalah pendidikan dan politik. Pendidikan politik merupakan pendidikan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat disiplin dan belajar bertanggung jawab. Pendidikan politik yang dilaksanakan dapat mengikuti secara aktif dan kreatif dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa sehingga mereka sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap bangsa dan kehadiran pendidikan politik dapat memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat khususnya siswa disekolah¹.

¹Pasaribu, payerli. Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan



Sosialisasi Pendidikan Politik calon Pemilih Pemula bagi kalangan pelajar SMP/SMA, khususnya yang akan atau sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek/paham demokrasi. Melalui sosialisasi, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga kalangan pelajar atau pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik karena mereka adalah calon-calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024 mendatang atau yang akan datang. Selain itu, para generasi penerus bangsa ini juga merupakan calon-calon pemimpin masa depan. pendidikan politik bagi pemilih pemula bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik, demokrasi di kalangan generasi muda atau kaum milenial dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik sehingga partisipasi mereka menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing meningkat.

Pendidikan politik, memiliki peran penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi lebih tertarik pada politik. Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada siswa-siswa sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoaks dalam menentukan pilihannya sesuai hati nurani. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalisir golput yang banyak berasal dari pemilih pemula sekaligus untuk merubah pola pikir mereka tentang pentingnya memberikan hak suara di pemilihan umum nantinya, sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang calon pilihannya baik di Pilkada maupun Pilpres.

Latar belakang yang mendorong terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dengan tema sosialisasi pendidikan politik bagi pelajar SMP/SMA di desa gunung sari Pondok Pesantren Fatimah Az Zahrah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ini adalah adanya berbagai fenomena-fenomena politik yang dewasa ini terjadi. Maka dari itu fenomena-fenomena yang terjadi ini menjadi pintu masuk bagi kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka untuk mengetahui proses dan tujuan pendidikan politik di sekolah bagi pelajar SMP/SMA.

Seperti yang banyak kita ketahui, politik sering diartikan sebagai seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan, yang pada pratiknya banyak sekali timbul penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh kekuasaan itu sendiri. Tetapi, pengertian politik yang seperti itu merupakan pengertian politik yang secara khusus merujuk kepada pengertian politik praktis. Yang perlu kita ketahui, pengertian atau pemahaman tentang politik yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara antar anggota masyarakat bersinergi untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam mengartikan politik.

Sementara itu berangkat dari masalah-masalah yang ada di dalam dunia politik Indonesia, maka ini menjadi alasan yang sangat kuat untuk pendidikan politik di sekolah harus dilakukan. Materi pendidikan politik di sekolah tentu tidak hanya dapat diterapkan dalam pembelajaran kelas, tetapi siswa juga dapat diberikan pendidikan politik melalui organisasi-organisasi siswa seperti OSIS, yang dalam hal ini dapat menjadi pembelajaran konkret pendidikan politik dalam hal bagaimana siswa melakukan pemilihan ketua OSIS dengan mempraktikkan asas-asas demokrasi yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pelajar SMP/SMA Di Desa Gunung Sari Pondok Pesantren Fatimah Az Zahrah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ini tentunya diharapkan dapat memenuhi tujuan sebagai berikut :

1. Mencetuskan sebuah hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kaltara yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan pendidikan politik di sekolah pada umumnya dan di lingkungan SMP/SMA pada khususnya Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan. Karena dengan terlaksananya pendidikan politik di sekolah yang baik, niscaya akan membentuk generasi-generasi muda penerus bangsa yang sadar akan politik dan mampu menumbuhkan suasana politik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan kualitas yang baik dalam pemberian pendidikan politik terhadap siswa agar tidak terjadi kesalahan dalam pengetahuan mereka tentang politik dan merekapun benar-benar mengetahuinya sehingga dapat memiliki jiwa kepedulian yang tinggi dan memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi politik².
3. Meningkatkan partisipasi politik, kegiatan yang dilakukan bagi seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan pemimpin negara/daerah yang dilakukan secara langsung/tidak langsung. Sebagaimana halnya dalam pemilihan ketua dan wakil ketua diorganisasi sekolah maupun diekstrakurikuler pasti ada partisipasi politik dari siswa/siswi. Maka partisipasi politik bagi siapapun khusus bagi siswa merupakan hal yang terpenting dalam negara demokrasi.
4. Pemberian materi mengenai pendidikan politik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di setiap sekolah mungkin bisa dikatakan dalam pemberian materinya berbeda-beda dan pemahaman siswanya pun dapat dikatakan berbedabeda. Tetapi, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadikan partisipan yang disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga dapat memahami dalam sebuah proses penggunaan kekuasaan dan penegakan aturan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Agar masyarakat dapat menggunakan hak politiknya serta menjadikan bangsa yang melek politik demi masa depan politik yang ada di Indonesia³.

Pendidikan politik melalui pembelajaran di sekolah dilakukan dengan mengintegrasikan pengetahuan berisi konsep, norma, etika, dan contoh perilaku politik ke dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Melalui mata pelajaran yang didesain memuat pengetahuan politik dan wawasan kebangsaan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dapat juga diselipkan dalam mata pelajaran lain, seperti sosiologi atau ilmu pengetahuan sosial lainnya. Untuk itu, pendidik diharapkan menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan relevan untuk menanamkan pengetahuan politik. Selain itu, juga mentransformasikan ilmu politik secara jelas kepada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk mampu bereaksi, berdebat, menerima, atau menolak pandangan yang

²Rahman Asmika, Suharno. Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 4(2)2019:282-290. Doi:<http://dx.doi.org/10.17977/umol9v4i2p282-290>

³Darmawan. Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Bdaya Politik Pancasila (Stdi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). JPPS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2016, 25;(1): DOI: <https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1665>



berbeda. Pemilih pemula ini diharapkan menjadi pemilih yang rasional, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga dapat merajut nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi⁴. Dilansir dari laman Kpi.go.id, dalam kesempatan tersebut anggota KPU menyampaikan harapannya kepada para generasi muda. Selaras dengan didominasinya pemilu 2024 oleh pemilih muda ini, maka penting bagi generasi muda untuk mengenali, mendalami, memeriksa visi misi para calon peserta pemilu⁵.

Terkait soal Keputusan Mahkamah Konstitusi soal kampanye di lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dan tidak memasang atribut partai politik sudah ada PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, di mana tempat pendidikan yang diperbolehkan hanya di perguruan tinggi. Kampanye pun hanya bisa dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Atas dasar itu pula menjadi penting kegiatan sosialisasi ini kami lakukan sebagai langkah awal dalam memberikan pendidikan politik bagi siswa siswi SMP dan SMA di lingkungan Desa Gunung Sari agar dikemudian hari mereka dapat memahami gejolak politik yang sering terjadi di masa-masa menjelang pemilihan.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kaltara berupa sosialisasi pendidikan politik bagi pelajar SMP/SMA di desa gunung sari Pondok Pesantren Fatimah Az Zahrah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan diawali dengan kuliah umum (ceramah), dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pelajar SMP/SMA dan pihak sekolah di lingkungan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Kegiatan Pengabdian diadakan secara offline/tatap muka pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 mulai pukul 09.00 – 16.00 Wita Di gedung BLK Ponpes Fatimah Az Zahrah Desa Gunung Sari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan dihadiri dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kaltara sebanyak enam (6) orang dan peserta sebanyak 41 siswa/siswi berasal dari SMP dan SMA Idrisiyah Ponpes Fatimah Az Zahrah. Dilaksanakan dengan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Adapun tujuan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk menganalisis, menggambarkan, serta merangkum berbagai kondisi dan situasi melalui berbagai data yang telah dikumpulkan. Data dimaksud dapat berupa hasil wawancara ataupun pengamatan masalah di lapangan⁶.

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam pengabdian ini yakni untuk meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan mengaplikasikan metode interaktif dalam proses tanya-jawab. Metode interaktif merupakan metode yang melibatkan interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik⁷. Sedangkan berdasarkan metode interaktif merupakan cara penyajian materi yang dilakukan oleh guru untuk mendukung interaksi aktif siswa

⁴<https://ugm.ac.id/id/berita/23646-mendiskusikan-tantangan-dan-peran-angkatan-muda-di-pemilu-2024/>

⁵<https://pemilu.tempo.co/read/1792974/gen-z-dan-generasi-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-apa-perbedaan-kedua-generasi-ini>.

⁶Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

⁷Suvriadi Panggabean., d. (2021). Konsep dan Strategi Pembelajaran. Medan: Yayasan Kita Menulis



dalam pembelajaran⁸. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa dalam penerapan metode interaktif dapat dilakukan berbagai kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta dan pemateri dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi pendidikan politik bagi kalangan siswa/siswi SMP dan SMA.

Gambar 1. Rundown acara pengabdian

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Unikalar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0532) 24190, unikalar.ac.id

**RUNDOWN ACARA PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TAHUN 2024**

TEMA
**SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR SMP/SMA
DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

SELASA, 16 JANUARI 2023		
WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08:00 - 08:15	Pembukaan	Ketua
08:15 - 08:20	Pembacaan Do'a	Masruri, S. Sos., M.I.P..
08:30 - 09:30	Materi :	
09:30 - 10:30	1. Pengantar Politik	1. Iskandar, S.Sos., MA
10:30 - 11:30	2. Etika Politik	2. Wempi Feber, S.Sos., M.Si
13:00 - 14:00	3. Budaya Politik	3. Jimmy N, SP., MA
14:00 - 15:00	4. Proses Politik	4. Masruri, S. Sos., M.I.P
15:00 - 16:00	5. Politik Lokal	5. Budi Mulyadi, S.I.P., M.I.P
16:00 - 17:00	6. Sistem Politik Indonesia	6. Irsyad Sudirman, S.I.P., MA
17:00 - Selesai	7. Infrastruktur dan Supra Struktur Politik	7. Syaini, S.Sos., M.I.P
	Penutupan	Ketua

Ketua
Iskandar, S. Sos., MA
NIDN. 11.251182.01

Gambar 2. Absensi Dosen dan Peserta Sosialisasi

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Unikalar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

**ABSENSI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR SMP/SMA DI DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

Tanjung Selor, 16 Januari 2024
Desa Gunung Sari

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Wempi Feber	Dosen	[Signature]
2	[Signature]		[Signature]
3	Masruri	Dosen	[Signature]
4	Jimmy N, SP.	Dosen	[Signature]
5	Syaini	Dosen	[Signature]
6	Budi M.	Dosen	[Signature]
7			
8			
9			
10			

Ketua
Iskandar, S. Sos., MA
NIDN. 11.251182.01

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Unikalar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

**ABSENSI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR SMP/SMA DI DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

Tanjung Selor, 16 Januari 2024
Desa Gunung Sari

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	SEKOLAH	TANDA TANGAN
21	JARA P		SMA Gunung Sari	[Signature]
22	[Signature]		SMP Sengkawit	[Signature]
23	A. Triana Sopian		SMA Sengkawit	[Signature]
24	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
25	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
26	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
27	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
28	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
29	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
30	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
31	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
32	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
33	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
34	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
35	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
36	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
37	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
38	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
39	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
40	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
41	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
42	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
43	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
44	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]
45	[Signature]		SMA Sengkawit	[Signature]

Tabel 1. Pembagian Tugas penanggungjawab Pengabdian

No.	Narasumber	Topik	Keterangan
1.	Iskandar, S.Sos., M.I.P	Pembuka Acara	Ketua Jurusan/ Pemateri
2.	Wempi Feber, S.Sos., M.Si	Pemateri 1	Etika Dalam Berpolitik
3.	Jimmy Nasroen, SP., MA	Pemateri 2	Budaya Politik
4.	Masruri, S.Sos., M.I.P	Pemateri 3	Proses Politik

⁸Habibati. (2017). Strategi Belajar Mengajar. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press



5.	Budi Mulyadi, S.IP, MA	Pemateri 4	<i>Politik Lokal dan Peranannya</i>
6.	Syaini, S.Sos, M.IP	Pemateri 5	<i>Infrasturktur Politik</i>
7.	Masruri, S.Sos, M.IP	Pembaca Do'a	Penutup
8.	Wempi Feber, S.Sos, M.Si	Penutup Acara	<i>Dekan</i>

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi pemilih pemula yang dimiliki Desa Gunung Sari dalam keikutsertaannya pada pemilu akan datang maupun kedepannya. Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor sebagai penghasil pertanian, maka masyarakatnya sejak dini bisa dibekali dengan pendidikan politik.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di dalam kelas merupakan kegiatan yang meliputi interaksi yang terjadi antara siswa dan guru. Salah satu hal yang menjadi kunci berjalannya kegiatan secara efektif adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran⁹. Keaktifan dalam pembelajaran memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa. Hal tersebut memberi arti bahwa partisipasi aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pemahaman serta mutu siswa¹⁰.

Gambar 3. Dosen Peserta Sosialisasi



HASIL

1. Profil Desa Gunung Sari

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Desa atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diatur dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

Desa Gunung Sari adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur yang dahulunya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jelarai Selor II penempatan tahun 1993

⁹Wibowo, N. (2016). Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa melalui Pembelajaran berdasarkan Gaya Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari. Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), 129.

¹⁰Naziah, S. T., Maula, L. H., & Sutisnawati, A. (2020). Analisis Keaktifan Siswa selama Pembelajaran Daring pada Masa Covid-19 di Sekolah Dasar. Jurnal JPSPD, 109-120.

¹¹<https://kectgselor.bulungan.go.id/desagunungsari/page/profil-des>



berjumlah 325 KK yang berasal dari Pandeglang Banten, Karawang Jabar, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar Jawa Timur, NTB, Bali dan dari Daerah setempat yang merupakan Transmigrasi Lokal¹².

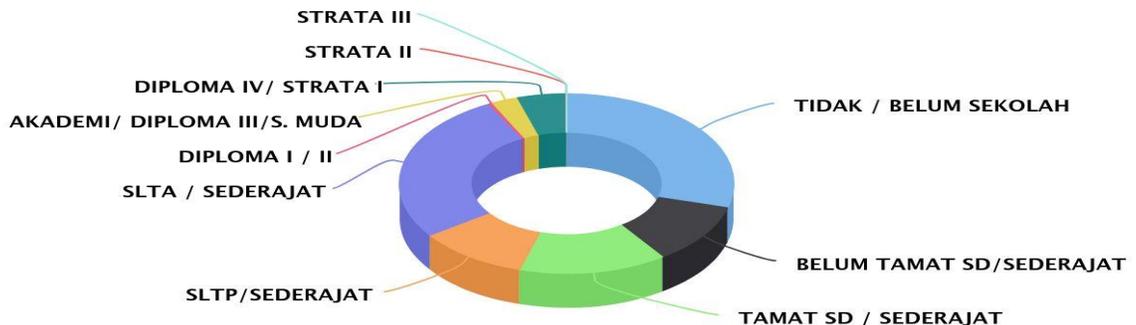
Desa Gunung Sari terletak di dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor

Luas wilayah Desa Gunung Sari 9967 Ha dimana 90% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 10 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Iklim Desa Gunung Sari, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor.

Gambar 4. Grafik Data Demografi Berdsarkan Pendidikan Dalam KK

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK



Tabel 2. Demografi Berdsarkan Pendidikan Dalam KK

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Tidak / Belum Sekolah	551	29.42%	294	15.70%	257	13.72%

¹²<https://desagunungsarikm12.blogspot.com/2019/>



No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	204	10.89%	107	5.71%	97	5.18%
3	Tamat Sd / Sederajat	267	14.26%	143	7.63%	124	6.62%
4	Sltp/Sederajat	200	10.68%	115	6.14%	85	4.54%
5	Slta / Sederajat	508	27.12%	357	19.06%	151	8.06%
6	Diploma I / li	7	0.37%	1	0.05%	6	0.32%
7	Akademi/ Diploma Iii/S. Muda	48	2.56%	10	0.53%	38	2.03%
8	Diploma Iv/ Strata I	87	4.64%	28	1.49%	59	3.15%
9	Strata li	1	0.05%	0	0.00%	1	0.05%
10	Strata Iii	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Belum Mengisi	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Total	1873	100%	1055	56.33%	818	43.67%

Sumber : <https://kectgselor.bulungan.go.id/desagunungsari/statistik/>

2. Pelaksanaan

Pendidikan politik tidak terbatas hanya soal pemilihan umum atau partai politik. Namun, pendidikan politik perlu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan karena menyangkut sistem nilai dalam demokrasi Indonesia, sehingga para siswa dapat menjadi warga negara yang berdaya dan berguna. Di acara sosialisasi pendidikan politik bagi siswa/siswi SMP dan SMA di Desa Gunung Sari terjadi arus diskusi dan refleksi bertajuk "Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kaltara berupa Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pelajar SMP/SMA Di Desa Gunung Sari Pondok Pesantren Fatimah Az Zahrah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten



Bulungan” yang dilaksanakan Dosen Fisip Universitas Kaltara di Desa Gunung Sari, terungkap pandangan generasi muda khususnya siswa yang masih apatis (tidak peduli) ketika berbicara politik.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua Jurusan Bapak Iskandar,S.Sos.,MA juga selaku narasumber pertama pada pukul 08.00 – 09.00 Wita. Dalam pembukaan beliau menyampaikan, tujuan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengabdian kepada masyarakat yang terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan *out put* (keluaran) yang diinginkan yakni :

1. Siswa SMP dan SMA di Desa Gunung Sari mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan politik bagi generasi pemula maupun yang akan datang sebagai representasi dari hak politik dalam demokrasi Republik Indonesia
2. Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
3. Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi lebih melek politik. Pendidikan politik dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Ketua Jurusan Bapak Iskandar,S.Sos.,MA, berharap melalui sosialisasi ini para pemilih pemula bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari paparan yang disampaikan oleh narasumber/pemateri. Dalam sosialisasi ini dipaparkan hal-hal berkaitan dengan tahapan-tahapan Pemilu dan yang mesti menjadi perhatian adalah aturan atau rambu-rambu mana yang diperkenankan dan yang dilarang dalam Pemilu nanti.

Gambar 5. Sambutan dan Pembukaan



Kemudian dilanjutkan oleh pemateri atau narasumber kedua pada pukul 09.30 – 10.30 Wita yang disampaikan oleh bapak Wempi Feber,S.Sos.,M.Si dengan materi tentang Etika dalam berpolitik atau etika politik. Dalam pemaparan beliau, tegas beliau menyampaikan tentang etika sebagaimana berikut :

"kita sebagai masyarakat kalau salah atau telah melanggar dalam pelaksanaan pemilu, bisa menjadi masalah dan mengarah pada hukum negara. Oleh sebab itu dalam sosialisasi inilah siswa mendapat pencerahan tentang pendidikan politik berdasarkan etikanya," , Selasa (16/01/2024).



Ketika membahas soal politik, misalnya tentang anggota dewan (legislatif), dari siswa langsung ada celetukan yang menganggap anggota dewan (legislatif) cenderung koruptor atau melakukan korupsi. Mereka memahami politik itu masih dilihat kotor. Sebagai narasumber/pemateri sekaligus dosen beliau menyampaikan dalam kegiatan tersebut perlu meluruskan dan menjelaskan secara etika dan perbuatan melawan hukum sehingga ada pencearahan bagi siswa. Oleh karena itu kita punya hak istimewa untuk dapat memberikan pendidikan politik lewat mata pelajaran atau program lainnya seperti saat ini yang dilakukan.

Gambar 6. Penyampaian Materi Narasumber kedua



Narasumber ketiga pada pukul 13.00 – 14.00 Wita, Bapak Masruri, S.Sos., M.IP dengan materi tentang proses politik, mengatakan, setiap dosen/guru memiliki celah untuk dapat memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat. Tentunya, ini dimulai dari kami sebagai dosen yang melaksanakan pembelajaran yang tidak otoriter, tetapi demokratis karena wujud politik adalah demokrasi itu sendiri.

Bapak Masruri, S.Sos., M.IP sebagai dosen politik mengatakan, ada sejumlah materi soal demokrasi dan pendidikan politik yang dapat diajarkan kepada siswa SMP dan SMA dari pelajaran sejarah yang dibawa sesuai konteks terkini. Materi tentang sistem pemerintahan serta politik dari masa ke masa dapat jadi pendidikan politik yang menarik bagi siswa.

Menurut narasumber, dalam realitasnya saat ini terjadi degradasi dalam pemaknaan arti politik, hal ini akan menjadi tantangan besar karena pendidikan politik harus berkelanjutan. Sejak dari awal yakni lingkungan rumah anak sudah belajar tentang demokrasi untuk saling menghargai dan menghormati kemudian disekolah dan di lingkungan masyarakat seperti yang beliau sampaikan berikut :

”pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bangsa ini. Jadi, tidak bisa instan tapi melalui tahapan (proses) dalam pemilu. Untuk menciptakan insan politik yang memiliki nilai etika dan moral yang tinggi, kita melakukannya harus berkelanjutan. Pendidikan politik bukan hanya ramai kalau ada agenda pemilihan kepala daerah atau pemilu saja tapi kapan dan kepada siapapun wajib mengetahui dan mendapatkan pendidikan

politik,” , Selasa (16/01/2024).

Untuk itu, setiap pendidik diharapkan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan relevan untuk menanamkan pengetahuan tentang politik. Selain itu, juga mentransformasikan ilmu politik secara jelas dan utuh kepada peserta didik dan mendorong peserta didik mampu bereaksi, berdebat, menerima ataupun menolak pandangan yang berbeda dari sumber manapun.

Gambar 7. Penyampaian Materi Narasumber ketiga



Sementara itu, Bapak Jimmy Nasroen, SP, MA sebagai narasumber ke-empat dengan materi tentang Budaya Politik mengatakan, KPUD Bulungan melaksanakan kegiatan KPU di sekolah-sekolah & Pondok Pesantren di sejumlah pelosok daerah/desa melaksanakan sosialisasi pendidikan politik meliputi penyampaian makna demokrasi, pluralisme, gotong royong, pemahaman mengenai isu hoaks, serta pentingnya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi dan misi, serta program hingga pemaknaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa penting untuk dilakukan dan dipahami oleh siswa-siswi SMP dan SMA di lingkungan Desa Gunung Sari khususnya yang berada siswa-siswi dilingkungan SMP dan SMA pondok pesantren Fatimah Az Zahrah.

Menurut Bapak Jimmy Nasroen, sekaligus juga sebagai anggota DKPP Propinsi Kalimantan Utara serta pengasuh Ponpes Fatimah Az Zahrah, menyampaikan kepada siswa-siswi SMP dan SMA, anak sekolah tidak boleh antipati dengan pendidikan politik. Karena realitas politik di negara kita dan masyarakat pada umumnya bisa menjadi isu yang dibahas dan disosialisasikan, pendidikan politik harus dilakukan terus menerus karena tentang sistem nilai, seperti antikorupsi, integritas, kejujuran, hingga kemauan menerima perbedaan salah satunya pendidikan politik pada generasi milineal/pemula.

Kesimpulannya, pendidikan politik melalui pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pengetahuan berisi konsep, norma, etika, dan contoh perilaku politik kedalam mata pelajaran yang diajarkan disekolah. Melalui mata pelajaran yang didesain memuat pengetahuan politik dan wawasan kebangsaan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan disekolah. Dapat juga diselipkan dalam mata pelajaran lain atau ilmu pengetahuan sosial lainnya.

Kepada pemiih pemula SMP dan SMA Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dalam kegiatan tersebut disampaikan tentang kondisi saat ini menjelang pemilu. Indonesia,



negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula. Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama¹³. Disela pembahasan, narasumber menyampaikan pesan kepada peserta sosialisasi sebagaimana berikut :

“Pemilih pemula atau pemilih akan datang ini diharapkan dapat menjadi pemilih yang rasional, mandiri, serta bertanggung jawab atas pilihannya yang didasari pengetahuan sehingga dapat merajut nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Republik Indonesia,” , Selasa, (16/01/2024).

Gambar 8. Penyampaian Materi Narasumber ke-empat



Gambar 9. Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Siswa SMP dan SMA



Bapak Syaini,S.Sos.,M.IP. selaku narasumber kelima, menyampaikan melalui literasi politik yang cerdas tentunya akan menghasilkan pemilih pemula yang paham dan mengerti perannya. Sehingga ada dua peran yang bisa dimaksimalkan oleh para pemilih pemula

¹³<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834>

khususnya siswa siswi SMA yang telah berusia 17 tahun, pertama mereka bisa mengawal pemilu dengan turut aktif melakukan edukasi orang sekitar tentang hoaks, disinformasi dan misinformasi serta aktif terlibat melaporkan isu atau konten-konten berbahaya, mengingat mereka sangat melek dengan yang namanya gadget. Kedua, pemilih pemula berperan menjaga untuk tidak lengah dan terbawa arus dengan tidak ikut serta turut dalam menyebarkan konten atau isu berbahaya lewat media sosial mereka masing-masing.

Dalam paparannya bapak syaini mengingatkan kepada siswa-siswi SMP dan SMA di desa Gunung Sari agar mereka mampu mengendalikan gadgetnya, dengan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang beredar, ajakan atau seruan yang menyesatkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum di Indoensia. Sebagaimana beliau sampaikan secara tegas dalam sesi materi sebagai berikut :

“Saya berharap penuh kepada pemilih pemula adik-adik sekalian harus memperhatikan akun media sosial pelaksana dan peserta kampanye, iklan kampanye, dan konten berbahaya yang membawa ketindakan kebencian atau ujaran kebencian sebagaimana marak yang terjadi di media sosial saat ini. Kalian sebagai pemilih pemula atau yang menjelang harus menerapkan budaya digital, yaitu kemampuan membaca dan membangun wawasan kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI dan UUD 1945 di kehidupan sehari-hari,”(Selasa, 16 /01/2024).

Gambar 10. Penyampaian Materi Narasumber kelima



Sehingga dapat disimpulkan bahwa lahir dalam generasi yang berbeda, secara otomatis menjadikan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula. Sehingga dasar perbedaan latar belakang ini juga menjadi dasar yang kemudian membedakan perilaku dan cara hidup Gen Z dengan milenial. Kaum Milenial yang tumbuh dikondisi hari ini dimana Indonesia sedang mengalami perubahan politik besar-besaran dalam masa orba dan reformasi tentu menjadikan mereka memiliki cara pandang yang berbeda pula mengenai politik itu sendiri. Milenial cenderung lebih terbuka dalam memandang politik maupun perilakunya serta reaktif terhadap segala perubahan yang terjadi di sekitar mereka.



Gambar 11. Foto bersama Narasumber dan Peserta Sosialisasi



Selanjutnya dalam panyampaiannya narasumber ke-enam Bapak Budi Mulyadi,S.IP, MA mengatakan, adapun salah satu tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMP dan SMA, sebagai pemilih pemula maupun pemilih mendatang tentang pelaksanaan eforia demokrasi dan mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dengan memperoleh pengetahuan dasar. Serta dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga ikut dalam pengawasan secara netral, sehingga memastikan proses demokrasi dapat direalisasikan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong siswa-siswi terlibat sebagai bagian dari peran pengawasan berjalannya pemilihan umum serta mendorong peran aktif pelajar untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Bapak Budi Mulyadi menambahkan, Ini merupakan langkah penting dalam penerapan budaya politik yang sehat dan demokratis. beliau juga menyatakan bahwa pemilih primer atau pemula memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu 2024. Sebagai generasi muda yang berpartisipasi dalam proses pemilu, pemilih pemula memiliki peluang yang baik untuk membentuk arah politik negara dalam jangka panjang. Pertama, pemilih mempunyai peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu karena mereka mempunyai jumlah suara yang signifikan. Selain itu, pemilih primer/pemula juga mewakili kepentingan generasi muda. Dengan memberikan suara, para pemilih pemula dapat memastikan bahwa kepentingan generasi muda terwakili dengan baik dalam pemerintahan. Pemilih baru menjadi agen perubahan. Dengan memilih, mereka dapat memilih kandidat dan partai politik yang berkomitmen mencapai tujuan dan visi yang selaras dengan nilai dan aspirasi mereka.



Gambar 12. Penyampaian Materi Narasumber Ke-enam



Gambar 13. Proses Diskusi Tanya Jawab



Sebagai penutup dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi SMP dan SMA dilingkungan Desa Gunung Sari maka, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)



sekarang telah menjadi bagian dari lingkungan sekolah itu sendiri dalam praktiknya telah dilakukan melalui kegiatan pemilihan sekiolah, terutama dalam pemilihan Ketua Kelas dan Ketua OSIS. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pendidikan pemilu yang dapat ditanamkan kepada generasi muda, termasuk pemilih pemula Pemilu ada tahun 2024 dan 2029 mendatang.



DISKUSI

Pada sesi tanya jawab dan diskusi sosialisasi pendidikan politik calon pemilih pemula bagi kalangan pelajar SMP/SMA peran dan fungsi pemilih pemula dalam sebuah kontestasi pemilu itu dihadiri sejumlah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara sebagai pengagas kegiatan tersebut pada pelaksanaan salah satu tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, siswa siswi dari SMP dan SMA, pengurus dan ketua OSIS. Pada sesi tersebut setelah narasumber menyampaikan materinya terdapat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang didasari informasi media sosial maupun keingintahuan mereka.

Pertama, pertanyaan yang disampaikan oleh pelajar siswa dari SMA Al - Irdisyah bernama Sintya Desita pada sesi narasumber 1 dan 3 tentang materi "Etika dan Budaya Politik", bertanya tentang, "bagaimana sikap dan perilaku kami dalam melihat perbedaan pilihan calon di keluarga, dimana kami diminta untuk memilih apa yang menjadi pilihan orang tua kami, sementara kami juga mempunyai pilihan lain dalam pemilu mendatang". Dalam konteks pertanyaan tersebut, kami menilai dinamika demokrasi politik belum berjalan sebagaimana teorinya didalam kehidupan keluarga. Pilihan dalam keluarga yang berbeda seharusnya menjadi dasar terbentuknya rasionalisasi pemilih terhadap pilihan masing-masing, namun hal tersebut tidak banyak terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya mereka sebagai pelajar kaum milineal pemilih pemula. Ada beberapa faktor mendasar hal tersebut terjadi sebagaimana pertanyaan tersebut diatas :

1. Pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang politik itu sendiri yang masih minim bahkan bisa dikatakan tidak mengerti.
2. Kurangnya pendidikan atau sosialisasi politik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu kepada masyarakat
3. Adanya solidaritas kekeluargaan yang tinggi terhadap kontestan sehingga pilihan dalam keluarga diarahkan satu calon
4. Terbentuknya sentimen atau polarisasi agama, suku, ras dan lainnya sehingga



menghancurkan semua anggota keluarga dipaksa menentukan calon sesuai kriteria diatas.

5. Pengaruh isu-isu tertentu, hoaknya yang berkembang tanpa dalil dan dasar yang kuat, menjadikan pilihan orang tua adalah yang terbaik sehingga si anak wajib mengikuti keinginan orang tua.
6. Fanatisme terhadap kelompok, golongan tertentu yang mengharuskan satu pilihan dan terkahir
7. Lemahnya sikap pemilih pemula dalam mempertahankan hak pilihnya yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan, pengaruh informasi media sosial yang menyesatkan dan sikap apatis dan cuek terhadap politik.

Sejalan dengan apa yang kami sampaikan diatas maka tentu rujukannya adalah dasar hukum itu sendiri, sebagaimana “ Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula, Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.

Selanjutnya bagaimana dengan kasus pertanyaan tersebut narasumber memberikan jawabannya, dalam iklim demokrasi, keniscayaan yang berbeda pilihan bisa berdampak baik dan buruk jika tidak disikapi dengan pikiran serta perilaku yang dewasa. Hal yang patut diwaspadai bersama adalah perbedaan pilihan di dalam keluarga, khususnya antara suami kepada istri dan anak. Pada momen ini pemilu mengajarkan kita untuk betul-betul dewasa dan berkepal dingin menyikapi perbedaan pilihan. Kemungkinan paling fatal dari perbedaan pilihan yang tidak mampu dikelola dengan baik, pada ujungnya akan berakhir di meja pengadilan agama alias perceraian atau pertengkaran antara anak dengan orang tua. Kita semua tidak ingin terjebak dalam pusaran yang berakibat fatal ini.

Patokan dasar dari kita sebagai pemilih agar tidak terjebak dalam pertikaian saat mendapati kenyataan keluarga tidak satu pilihan dengan kita adalah "bagaimana memprobing keutuhan keluarga kita lebih penting untuk dijaga" dibandingkan dengan membuat keputusan fanatik saat menjatuhkan pilihan untuk mendukung pilihan tertentu.

Salah satu teori yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah teori rational choice atau teori pilihan rasional. Teori ini berasal dari ilmu ekonomi dan kemudian diterapkan pada bidang-bidang lain seperti sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Teori ini mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka. Dalam konteks politik, teori ini menganggap bahwa aktor-aktor politik memiliki preferensi yang tetap, konsisten, dan dapat diukur. Preferensi tersebut kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk memilih alternatif tindakan yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri¹⁴.

Dasar teoritis pilihan rasional menekankan bahwa seorang individu melakukan

¹⁴<https://www.kompasiana.com/tominurdiyana/6559ebae6ad0151bd1051a22/politik-sebagai-pertukaran-sosial-sebuah-tinjauan-kritis-terhadap-teori-rational-choice>



sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, tindakan seseorang itu merupakan tindakan purposif atau bertujuan¹⁵. Teori rational choice juga menganggap bahwa situasi politik adalah situasi pertukaran sosial, yaitu situasi di mana aktor-aktor politik saling memberi dan menerima sesuatu yang bernilai bagi mereka. Nilai tersebut bisa berupa materi, informasi, dukungan, legitimasi, atau hal-hal lain yang relevan. Dalam pertukaran sosial, aktor-aktor politik akan membandingkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh dari setiap alternatif tindakan.

Dalam kasus pada pertanyaan siswa diatas tersebut yang mengharuskan mengikuti pilihan orang tua ada kecenderungan pada kepribadian dalam psikologi yang dapat dijelaskan dalam beberapa pendekatan. ¹⁶Organ kepribadian seorang “makhluk politik” terdiri dari lima unsur yakni sikap, kognisi, nilai, identitas, dan emosi. Istilah-istilah ini sering dijumpai dalam kajian psikologi sosial, namun dalam kamus politik istilah-istilah ini tergolong baru.

Kedua, pertanyaan yang diajukan oleh siswa dari sekolah yang sama SMA Al – Irdisyah bernama Winda pada sesi narasumber 3 dan 4 tentang materi “Proses Politik dan Politik Lokal”, bertanya tentang, “bagaimana sikap kami, adanya money politik atau politik uang yang terjadi dalam keluarga bahkan teman yang mengajak untuk memilih calon yang memberikan sejumlah uang”.

Terhadap pertanyaan tersebut kami menjawab secara parsial dan komprehensif bagaimana praktik politik uang dalam perselisihan politik sudah menjadi hal yang lumrah karena sudah menjadi budaya, mempengaruhi sistem politik demokrasi dan akhirnya menjadi penyebab politik mahal. Politik uang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah serangan fajar yang dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat diubah menjadi uang pada saat tahun politik atau kampanye pemilu. Dalam kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kampanye antikorupsi bertema “Hajar Serangan Fajar” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik uang dan antikorupsi menjelang pemungutan suara. Melalui kampanye Hajar Serangan Fajar diharapkan masyarakat dapat menolak segala bentuk pemberian.

“Serangan Fajar” merupakan istilah populer dari politik uang. Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang. Namun, juga dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018. Aturan mengenai bahan kampanye yang diperbolehkan oleh KPU dan bukan termasuk dalam serangan fajar dijelaskan secara rinci pada Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi: Bahan kampanye dalam bentuk selebaran/flyer, brosur/leaflet, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan atau alat tulis. Oleh karenanya, kita sebagai pemilih bahkan pemula harus menggunakan hak suara sesuai dengan hati nurani, tidak rela jika suara kita terbeli oleh serangan fajar. Pilihan kita adalah hak kita sebagai warga negara¹⁷.

¹⁵Coleman & S. James. 1994. Rational Choice Theory. Terjemahan E. Priyanto. 2008. Dasar-Dasar Teori Sosial. Bandung: Nusa Media

¹⁶Cottam, M.L., Mastors, E., Preston, T., & Uhler, B.D. (2012). Pengantar Psikologi Politik (Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali

¹⁷<https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar>



Serangan fajar tidak sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi yaitu nilai jujur, adil, dan tanggung jawab. Kita harus berani menolak atau menghindari serangan fajar supaya kita bisa bebas memilih sesuai hati nurani dan mencegah terjadinya korupsi. Adapun pada ayat 6 yang berbunyi: Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000.

Gambar 14. Ilustrasi Politik Uang



SANKSI POLITIK UANG

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Pasal 523 ayat 1-3

ayat 1: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

UU PILKADA

Pasal 187 A

ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

UU PEMILU

ayat 2: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.

ayat 3: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

ayat 2: Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Sumber : Pusat Edukasi Anti Korupsi

Apa yang harus siswa-siswi lakukan untuk tidak mengikuti melakukan politik uang, meskipun perintah atau ajakan dari keluarga/orang tua, kawan dan teman sejawat. Dalam sosialisasi tersebut kami menyampaikan bentuk tindakan yang dapat dilakukan agar tidak



masuk dalam aktivitas politik uang, sebagaimana berikut :

1. Tolak dan hindari segala bentuk pemberian yang mengarah kepada salah satu oknum sebelum maupun menjelang pemilihan umum. Dengan sikap menolak kalian berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindak korupsi dan kecurangan dalam pemilu.
2. Laporkan segala bentuk perilaku, tindakan dan perbuatan para kontestan yang mengarah kepada money politik ke Bawaslu atau Panwaslu setempat.
3. Aktif menyebarkan pesan kampanye Hindari/tolak politik uang ataupun serangan fajar melalui berbagai media sosial. Agar semakin banyak orang yang sadar, paham dan terlibat untuk turut menyuarakan Tolak Politik Uang jelang pemilihan umum.

KESIMPULAN

Sosialisasi Pendidikan Politik calon Pemilih Pemula bagi kalangan pelajar SMP/SMA, khususnya yang akan atau sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek/paham demokrasi. Melalui sosialisasi, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga kalangan pelajar atau pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik karena mereka adalah calon-calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024 mendatang atau yang akan datang. Selain itu, para generasi penerus bangsa ini juga merupakan calon-calon pemimpin masa depan. pendidikan politik bagi pemilih pemula bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik, demokrasi di kalangan generasi muda atau kaum milenial dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik sehingga partisipasi mereka menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing meningkat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi pemilih pemula yang dimiliki Desa Gunung Sari dalam keikutsertaannya pada pemilu akan datang maupun kedepannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di dalam kelas merupakan kegiatan yang meliputi interaksi yang terjadi antara siswa dan guru. Salah satu hal yang menjadi kunci berjalannya kegiatan secara efektif adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

Dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dan interaktif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Kepada pemilih pemula SMP dan SMA Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dalam kegiatan tersebut disampaikan tentang kondisi saat ini menjelang pemilu. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula. Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut sebagai berikut :

1. Hendaknya Siswa SMP dan SMA di Desa Gunung Sari lebih meningkatkan pengetahuannya tentang pendidikan politik sebagai representasi dari hak politik dalam demokrasi



Republik Indonesia

2. Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Maka diharapkan penggunaan media sosial dapat menjadikan sarana informasi untuk pengetahuan politik dan menggunakannya secara arif dan bijaksana
3. Peran pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis sehingga hak pilih tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya dengan tidak mengikuti atau melakukan tindakan politik uang dalam bentuk pemberian apapun.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Kaltara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Desa Gunung Sari serta pihak sekolah SMP dan SMA di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, masyarakat yang telah membantu kami dalam kegiatan pengabdian maupun dalam penulisan artikel publikasi ilmiah yang secara khusus melalui surat penugasan, serta semua pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut yang membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman sejawat dosen yang terlibat sebagai fasilitator yang memberikan waktu dan materinya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Pasaribu, payerli. Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. 2017,5;(1):51- 59. Doi:<http://ojs.uma.ac.id/mdex.php/jppuma>
- [2] Rahman Asmika, Suharno. Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 4(2)2019:282-290. Doi:<http://dx.doi.org/10.17977/umol9v4i2p282-290>
- [3] Darmawan. Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Bdaya Politik Pancasila (Stdi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). JPPS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2016, 25;(1): DOI:
- [4] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- [5] Suvriadi Panggabean., d. (2021). Konsep dan Strategi Pembelajaran. Medan: Yayasan Kita Menulis
- [6] Habibati. (2017). Strategi Belajar Mengajar. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- [7] Wibowo, N. (2016). Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa melalui Pembelajaran berdasarkan Gaya Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari. Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), 129.
- [8] Naziah, S. T., Maula, L. H., & Sutisnawati, A. (2020). ANalisis Keaktifan Siswa selama Pembelajaran Daring pada Masa
- [9] Coleman & S. James. 1994. Rational Choice Theory. Terjemahan E. Priyanto. 2008. Dasar-Dasar Teori Sosial. Bandung: Nusa Media
- [10] Cottam, M.L., Mastors, E., Preston, T., & Uhler, B.D. (2012). Pengantar Psikologi Politik



(Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali

- [11] <https://kectgselor.bulungan.go.id/desagunungsari/page/profil-des>
- [12] <https://desagunungsarikm12.blogspot.com/2019/>
- [13] <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834>
- [14] <https://www.kompasiana.com/tominurdiyana/6559ebae6ad0151bd1051a22/politik-sebagai-pertukaran-sosial-sebuah-tinjauan-kritis-terhadap-teori-rational-choice>
- [15] <https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar>
- [16] <https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1665><https://ugm.ac.id/id/berita/23646-mendiskusikan-tantangan-dan-peran-angkatan-muda-di-pemilu-2024/>
- [17] <https://pemilu.tempoco/read/1792974/gen-z-dan-generasi-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-apa-perbedaan-kedua-generasi-ini>.